

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 1-15 AGUSTUS 2024

■ Sekretariat Jenderal

■ Varia Senat

**HUT Ke-5 DWP Setjen DPD RI
Peduli dan Berbagi Kebahagiaan**

**Implementasi
UU Pemasyaraktan
Belum Mampu Atasi
Masalah di Lapas**



**BLOKIR APLIKASI
JUDI ONLINE!**

**Kesenjangan dan Ketidakadilan
Hasilkan Kemiskinan Struktural**

SCAN ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



9

772987

311004



SENAT UTAMA

04



- Blokir Aplikasi Judi *Online!*
- Jangan Tergiur Judi *Online*
- Perlu Kolaborasi Atasi Judi *Online*
- *Fahira Idris Usulkan*
7 Strategi Berantas Judi *Online*

NUSANTARA

10

- Kesenjangan dan Ketidakadilan Hasilkan Kemiskinan Struktural
- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Perlu Terus Dievaluasi
- Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI Fadel Muhammad: Banyak Pihak Usulkan Perubahan Terhadap UUD
- Ketua FAK Jimly Asshiddiqie: Amendemen Kelima UUD 1945 Sebuah Keniscayaan
- Asta Cita Prabowo-Gibran Perlu Dijadikan PPHN 2024-2029
- Daerah Penyangga IKN Kaltim Harus Dibuat Keren
- Senator Syech Fadhil Dukung Mengaji Limit Sebelum Belajar
- Guru Swasta di Lampung Utara Curhat ke Senator Abdul Hakim
- LaNyalla Minta Pemda Dukung Program Sertifikat Halal
- 5 Aktivistis NU Temui Presiden Israel Pemerintah Diminta Bersikap Tegas
- Perlu Dievaluasi, Sidang Bersama DPR-DPD RI

VARIA SENAT

22

- Implementasi UU Pemasarakatan Belum Mampu Atasi Masalah di Lapas
- Pengawasan Obat dan Makanan Perlu Secara Komprehensif
- Ketua Komite I DPD RI Kunjungi Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh

SEKRETARIAT JENDERAL

25

- HUT Ke-5 DWP Setjen DPD RI Peduli dan Berbagi Kebahagiaan
- Kantor DPD RI Aceh Kerja Sama dengan Museum Tsunami Aceh

GALERI FOTO

27



GAGASAN

28

- Penguatan Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Alasan dan Dasar Hukumnya

WISATA

30

- Empat Destinasi Paling Disenangi di Bandar Lampung
Four Most Popular Destinations in Bandar Lampung





Judi Online yang Menyengsarakan

Judi *online* di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi jutaan orang dan mengakibatkan kerugian finansial ditaksir mencapai 600 triliun rupiah. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet. Banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran setan perjudian *online*, yang sering kali berawal dari rasa ingin tahu atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat. Namun, kenyataannya, banyak yang justru terjatuh hutang dan kehilangan harta benda.

Dampak negatif dari judi *online* tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak rumah tangga yang hancur akibat kecanduan judi, dengan konflik dan ketegangan meningkat di antara anggota keluarga. Selain itu, judi *online* juga berdampak pada kesehatan mental para pelakunya, yang sering mengalami stres, depresi, dan keceemasan akibat kerugian yang terus-menerus.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai cara, termasuk memblokir situs judi *online* dan penangkapan pelaku perjudian. Namun, upaya ini sering kali terbentur oleh kreativitas para pelaku judi yang terus mencari celah untuk beroperasi. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi *online* juga menjadi tantangan besar. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

Solusi yang lebih efektif mungkin termasuk peningkatan edukasi dan kampanye kesadaran tentang risiko judi *online*, serta penyediaan layanan bantuan bagi mereka yang kecanduan. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku judi *online* juga sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan masalah judi *online* di Indonesia dapat diminimalisir dan masyarakat dapat terbebas dari jeratan judi yang merusak ini. **(* /Pimred)**

Misery-inflicting Online Gambling

Online gambling in Indonesia has turned into a serious problem affecting millions of people and has resulted in financial loss approximately amounting to 600 trillion rupiah. The phenomenon has rapidly developed alongside technology advancement and easy internet-access. Major society falls trap into the vicious cycle of online gambling which is frequently initiated by curiosity or coveting instant gains. Yet, as a matter of fact, many get entangled into debt and assets' loss.

The negative impact of online gambling is not only suffered by individuals but also is endured by families and the communities as a whole. Many households are devastated due to gambling addiction, coupled by conflict and increasing tension among family members. Besides, online gambling affects the mental health of its partakers who frequently suffer stress, depression, and anxiety due to perpetual loss.

The Indonesian Government has endeavoured to mitigate the problem by various ways, including blocking online gambling sites and confiscating gambling operators. Nonetheless, the effort is frequently frustrated by the cunning creativity of gambling operators who constantly seek loopholes to be able to continue their operation. In addition to that, lack of education and awareness of the society concerning the risk of online gambling has also prompted tough challenges. A more comprehensive and collaborative approach between the government, the community, and private sectors is required to cope with the problem.

*A more effective solution may include improvement in education and awareness campaign concerning online gambling risks, as well as providing help support service to gambling addicts. Besides, affirmation of a more assertive regulation and law enforcement against online gambling operators is indispensable. With a holistic approach, it is expected the problem of online gambling in Indonesia can be mitigated and the society can be freed from the devastating gambling trap. **(* /Chief Editor)***

SENATOR 
MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin PENGARAH Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB Heru Firdan REDAKTUR PELAKSANA Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO & GRAFIS Agus Wiharto EDITOR Mas Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho

DESAIN GRAFIS Dimas Yullian Susanto FOTOGRAFER Arifin Nur Wijaya, Eko Sudjarwo, Undang Gunawan, Ryan Nuur Fajri, Rachmad Irfan Dwinanto SEKRETARIAT Encep Subandi, Didin Saputra, Dewi Oktaviyanti, Ananda Mahana Arleg,

Muhamad Fathoni, Nanda Russia Rola, Helena Agustina Fernandez Ojan, Rini Sumarni TIM PENULIS ARTIKEL Lela Sadiyah, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Juan Federick Malik Turpyn, M. Arya Pratomo, Hestiana Kiftia Sari, Fandi Tri Prayogo

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270.

Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id //

IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

BLOKIR APLIKASI JUDI ONLINE!



Pemberitaan tentang judi online semakin marak di media massa akhir-akhir ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya rekening sejumlah wakil rakyat di Senayan dan daerah yang diduga terlibat dalam aktivitas judi *online*. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, juga menyebutkan bahwa seseorang berinisial T diduga memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Kamboja untuk sektor judi *online* dan penipuan *online*.

Fenomena ini mendapat perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia dengan tegas meminta pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk menutup atau memblokir aplikasi judi *online*. LaNyalla menekankan bahwa judi *online* telah menyasar anak-anak muda dan merusak generasi

penerus bangsa.

“Kebijakan yang diambil harus secara moral demi menyelamatkan generasi muda kita sebagai aset bangsa dan juga melindungi harta masyarakat. Keberadaan aplikasi dan situs judi *online* jelas bertentangan dengan hukum. Judi *online* adalah perbuatan melanggar hukum. Kominfo harus tegas membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang merusak generasi kita,” ujar LaNyalla.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, juga menyatakan bahwa judi *online* adalah penyakit sosial yang sangat meresahkan. Dampak negatifnya nyata, mulai dari risiko keuangan, tindakan kriminal, pelanggaran privasi, hingga masalah kesehatan mental.

“Kita semua prihatin dengan fenomena judi *online* yang telah menyebar luas, termasuk di kalangan generasi muda. Sayangnya, masyarakat tidak menyadari bahwa judi *online* merupakan bentuk penipuan keuangan yang sering menimbulkan kerugian besar,” kata Sultan.

Senator dari Bengkulu ini berharap agar kementerian terkait, lembaga penegak hukum, dan rohaniawan bekerja sama untuk menanggulangi penyebaran judi *online*. “Judi *online* atau *slot* bahkan sudah merambah desa-desa dengan jaringan internet, mengancam kehidupan sosial masyarakat, khususnya generasi muda, dalam jangka panjang,” tambah Sultan.

Sultan juga mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memblokir 5.000 rekening yang diduga terkait judi *online*. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini yakin bahwa upaya OJK akan memberikan dampak signifikan dalam menekan transaksi judi *online*. (*)

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





Jangan Tergiur Judi *Online*

Kekhawatiran dengan maraknya judi *online* juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah. Dia mengimbau masyarakat di daerah pemilihannya jangan tergiur dengan judi *online* dan menjauhi permainan haram tersebut.

“Dari segi agama sudah jelas bahwa judi itu haram hukumnya. Masyarakat jangan sampai ikut-ikutan, terbawa-bawa karena tergiur keuntungan, akhirnya bisa terjerat judi *online*. Apalagi sudah jelas tidak berizin,” kata Habib dalam sebuah kegiatan sosial di Banjarmasin, Sabtu (20/7/2024).

Habib meminta masyarakat, khusus kaum milenial, untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi. Generasi muda harus menguasai teknologi informasi dan tidak boleh kalah dengan negara lain, seperti Korea Selatan, China, Jepang yang sudah sangat maju teknologinya. Di era digital saat ini harus tampil, bisa bersaing, sejajar dan kalau perlu lebih hebat dalam penguasaan teknologi digital.

“Kemajuan teknologi begitu luar biasa. Kita harus ikut berperan mendalami bahkan menjadi ahlinya. Tetapi hal yang merugikan harus diantisipasi. Jangan sampai kemajuan teknologi justru berdampak negatif bagi masyarakat dan para milenial, seperti bermain judi *online* dan pinjaman *online*,” katanya.



Anggota DPD RI Habib Hamid Abdullah
(Foto Istimewa)

Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Asni Hafid, dengan tegas meminta pemerintah



Anggota DPD RI Asni Hafid
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mencegah judi *online* masuk ke Indonesia. Asni menyebut pemerintah seharusnya memastikan judi *online* diberantas. Ia menilai tidak memungkinkan pemerintah bisa terus-menerus mengontrol masyarakat, termasuk para wakil rakyat bermain judi *online* atau tidak. “Intinya pencegahan langsung oleh pemerintah, itu yang perlu,” tegasnya.



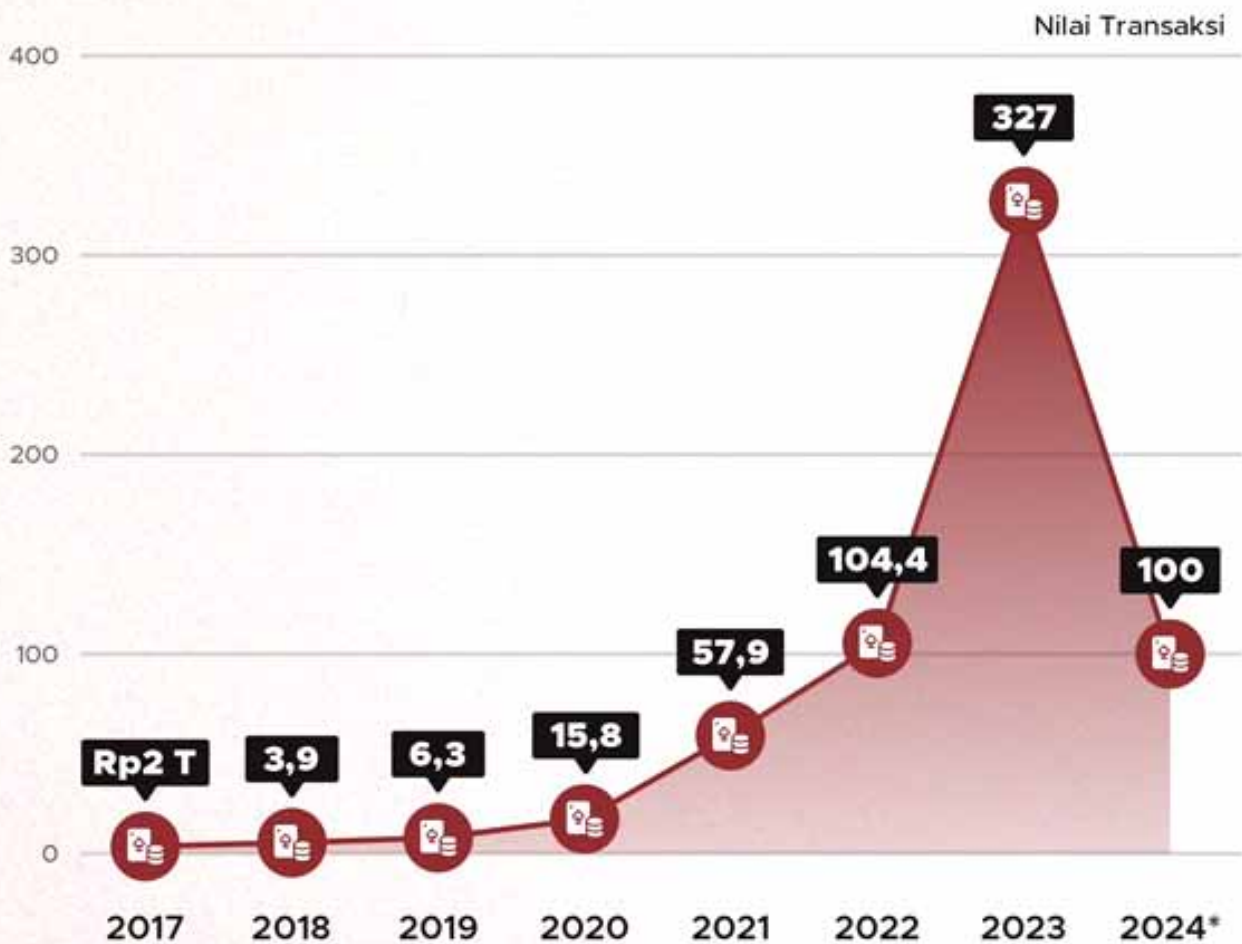
Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto, menilai praktik judi

Anggota DPD RI Abraham Liyanto
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

online yang sekarang ini marak terjadi sangat menyengsarakan rakyat. Palsanya, akibat judi *online*, masyarakat bisa jual motor, mobil, rumah hingga tanah. Dampak lain adalah sering terjadi pertengkaran suami-istri dalam keluarga. Bahkan berujung perceraian karena kalah judi *online*. “Ini banyak terjadi di NTT. Saya yakin di tempat lain di republik ini juga terjadi hal serupa,” kata Abraham. (*)

GoodStats

Transaksi Judi Online di Indonesia Tembus Rp100 Triliun di Awal 2024



* Sepanjang Kuartal I



01

Sumber: Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Gambar: Freepik, iStock

Perlu Kolaborasi Atasi Judi *Online*

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Kanedi, mengatakan perlu solusi inovatif sebagai upaya mengatasi permasalahan judi *online* yang semakin marak dan telah mengganggu ketenteraman masyarakat. Perjudian *online* telah menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di daerah pemilihannya, Bengkulu.

“Masalah perjudian *online* ini sangat serius dan telah mengganggu ketenteraman masyarakat. Dibutuhkan pendekatan yang kreatif dan efektif untuk memberantasnya. Perlu kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perjudian *online* ini,” kata Ahmad Kanedi saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Bengkulu, Senin (22/7/2024).

Senator dari Bengkulu itu menyebut aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi



Anggota DPD RI Ahmad Kanedi bersama Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Agus Salim. (Foto Radar Bengkulu)

juga memicu berbagai tindak kriminal lainnya, seperti penipuan dan pemerasan. Dampak buruk dari judi *online* ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

“Kasus perjudian *online* tidak hanya berdampak negatif pada pelaku dan korban langsung, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Masyarakat menjadi resah dan khawatir akan keamanan lingkungan mereka,” kata Ahmad Kanedi.

Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Agus Salim, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap judi *online* yang semakin memprihatinkan di tengah masyarakat Bengkulu. Dengan adanya langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan judi *online* di Bengkulu dan daerah lainnya di Indonesia bisa segera teratasi, sehingga

masyarakat bisa hidup dengan lebih tenang dan aman.

Pada kesempatan yang berbeda, anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha, mengatakan bahaya judi *online* semakin mengkhawatirkan. Aktivitas haram tersebut telah merambah hampir semua kalangan dan profesi di Indonesia, baik masyarakat umum, penegak hukum, anggota dewan, bahkan wartawan sebagaimana penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah tersebut meyakini Satgas Pemberantasan Judi *Online* yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto akan memerangi dan mengatasi kecanduan masyarakat terhadap permainan haram tersebut. “Menkopolhukam berani dan tanpa kompromi dalam membongkar praktik judi *online*. Cara penanganan yang dilakukan efektif dan membuat pemain serta para bandar judi *online* ketar-ketir,” ujar Abdul Rachman. (*)



Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Fahira Idris Usulkan 7 Strategi Berantas Judi *Online*

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris menilai judi *online* telah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial yang kompleks. Karena itu, diperlukan upaya yang cepat, tepat, terukur, dan menyeluruh untuk menangani berbagai dimensi dari persoalan tersebut, mulai dari regulasi hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itulah Fahira mengusulkan tujuh strategi komprehensif untuk memberantas judi *online* tersebut. “Strategi atau upaya pertama yaitu penegakan hukum yang ketat dan tegas. Pentingnya pemberian sanksi berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Ini termasuk hukuman penjara yang panjang dan denda yang signifikan,” kata Fahira bulan lalu.

Selain itu, Senator dari DKI Jakarta itu mengusulkan pembentukan *task force* khusus dengan wewenang penuh untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan

penuntutan terhadap pelaku judi *online*, serta bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menangkap pengelola situs yang beroperasi dari luar negeri.

Strategi kedua adalah menguatkan regulasi dan kerja sama dengan penyedia layanan internet atau *internet service provider* (ISP). Perlu teknologi blokir berlapis yang terus dimutakhirkan untuk mempersulit akses ke situs-situs judi *online*. Platform media sosial (medsos), aplikasi, dan *marketplace* untuk mendeteksi serta menutup iklan dan promosi terkait judi *online*.

Strategi ketiga adalah edukasi dan sosialisasi. Penting dilakukan kampanye publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi *online*. Perlu disebarluaskan testimoni korban judi *online* dan informasi dampak negatifnya. Kampanye ini disebarluaskan lewat semua *platform* media. Materi edukasi tentang bahaya judi *online* diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, terutama di tingkat sekolah menengah atas.

Adapun strategi keempat, yaitu memantau transaksi keuangan. Fahira mengusulkan kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memantau dan melaporkan

transaksi mencurigakan yang terkait dengan judi *online*. Selain itu, perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan kartu kredit dan *e-wallet* untuk judi *online*, serta memastikan bahwa perusahaan pinjaman *online* (pinjol) tidak memberikan utang kepada individu yang diketahui menggunakan dana tersebut untuk berjudi.

Strategi kelima adalah menjalin kerja sama dengan badan internasional seperti Interpol karena banyak situs judi *online* berbasis di luar negeri. Kerja sama ini tidak hanya untuk melacak dan menangkap, tetapi juga sebagai ajang pertukaran informasi dan teknologi dengan negara-negara lain yang telah berhasil memberantas judi *online*.

Untuk strategi keenam, Fahira menekankan bahwa pemberantasan judi *online* juga harus mencakup upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. “Kita harus meluaskan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat untuk mengurangi daya tarik judi *online* sebagai cara cepat mendapatkan uang,” imbuhnya.

Untuk strategi terakhir, Fahira mengusulkan untuk menyediakan layanan bantuan dan konseling serta program rehabilitasi bagi korban kecanduan judi *online* di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, orang tua perlu mengedukasi diri soal judi *online* sehingga bisa menjadi benteng agar anak dan anggota keluarga lain tidak terpapar. (*)



(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kesenjangan dan Ketidakadilan Hasilkan Kemiskinan Struktural



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menghadiri FGD yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jawa Timur, di Surabaya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa perjalanan berbangsa dan bernegara ke depan harus dikawal dengan tekad bersama yang kuat. Tantangan dunia ke depan, termasuk ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, disrupsi teknologi, dan perubahan iklim, dapat menyebabkan krisis. Tekad bersama ini hanya bisa dirajut melalui saluran yang memberikan ruang

kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara, dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan, memberikan keadilan, dan menjawab tantangan masa depan.

“Itulah mengapa MPR RI harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara, yang diisi bukan saja oleh mereka yang dipilih melalui pemilu legislatif, tetapi juga oleh utusan dari bawah, mencakup semua elemen bangsa tanpa ada yang ditinggalkan. Sehingga

benar-benar terwujud penjelmaan rakyat dan para hikmat, yang menentukan arah perjalanan bangsa dengan tolok ukur mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar LaNyalla dalam *Focus Group Discussion* yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jawa Timur, di Surabaya, Senin (15/7/2024).

LaNyalla menjelaskan bahwa sistem bernegara



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerahkan cendera mata kepada Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur Biyanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

hasil amendemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002 telah menghasilkan sistem politik yang mahal dan oligarki ekonomi yang mendikte kebijakan dan sistem politik. “Akibatnya, bangsa kita lambat laun menjadi bangsa lain. Akar budaya dan watak bangsa Indonesia perlahan tercebab, dari bangsa yang integralistik, gotong-royong, dan spiritualistik-patriotis, menjadi individualistik, kapitalistik, dan materialistik-

pragmatis,” katanya. Dalam dua dekade reformasi, indikator ketidakadilan berupa kesenjangan ekonomi dan sosial semakin tinggi.

LaNyalla menambahkan bahwa kesenjangan dan ketidakadilan dalam penguasaan ekonomi, tanah, alat produksi, akses pendidikan, dan kesehatan telah menghasilkan kemiskinan struktural yang sulit diselesaikan. “Jika jalan yang ditempuh hanya melalui subsidi dan bantuan sosial,

maka akan terus menjadi beban fiskal negara yang pada suatu titik akan mengalami *default*,” ujarnya.

Oleh karena itu, LaNyalla menekankan perlunya jalan keluar agar pemerintah dapat terus membangun dan berdaulat melalui dukungan rakyat yang kuat. Dukungan rakyat ini harus diwujudkan melalui sistem yang kembali kepada nilai-nilai Pancasila, membangun semangat kebersamaan sesuai pikiran para pendiri bangsa. (*)



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo:

UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Perlu Terus Dievaluasi

Ketua MPR RI ke-16 yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa UUD 1945 bukanlah kitab suci yang tabu untuk diubah. Ia sepakat dengan Ketua Forum Aspirasi Konstitusi dan Anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie, bahwa konstitusi harus terus dievaluasi agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Bamsoet menilai, setelah 25 tahun reformasi dan empat kali amendemen, perlu dilakukan penataan kembali sistem politik ketatanegaraan untuk memastikan konstitusi berfungsi optimal bagi kemajuan bangsa.

Evaluasi konstitusi, menurut Bamsoet dalam FGD bertajuk bertajuk “Penataan MPR, DPR, DPD RI di Masa

Depan” di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 29/7/2024), tidak hanya soal penataan kewenangan lembaga negara seperti penguatan MPR RI, tetapi juga perbaikan redaksional penulisan konstitusi. Jimly menyebut proses ini sebagai merakit, merajut, dan menjahit kembali naskah konstitusi pasca-reformasi. Hasil kajian ini akan menjadi rekomendasi bagi pimpinan MPR periode 2024-2029.

Forum Aspirasi Konstitusi, lanjut Bamsoet, telah menyerap aspirasi dari berbagai kalangan yang menginginkan MPR RI kembali menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Hal ini dianggap penting agar MPR RI bisa berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai perselisihan politik dan hukum

di Indonesia.

Selain dari sisi kewenangan, Bamsoet menilai keanggotaan MPR perlu diisi kembali oleh utusan golongan, selain anggota DPR RI dan DPD RI. Kehadiran utusan golongan sejak awal kemerdekaan diinisiasi oleh para pendiri bangsa dengan semangat inklusivitas, yang dihapuskan oleh reformasi. Akibatnya, banyak kelompok masyarakat merasa tidak terwakili dan ditinggalkan.

“Keberadaan utusan golongan juga diterapkan di parlemen negara maju seperti *House of Lords* di Inggris dan *Rajya Sabha* di India. Esensi demokrasi bukan hanya keterpilihan, tetapi juga keterwakilan. Tidak semua yang dipilih melalui pemilu dapat mewakili aspirasi seluruh rakyat,” kata Ketua MPR ini.

Utusan golongan, seperti seniman, budayawan, adat, agamawan, dan profesional seperti guru, wartawan, dan dokter, dapat memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki suara dalam proses legislatif dan kehidupan kebangsaan yang lebih luas. Bamsoet menekankan pentingnya perspektif dan masukan dari berbagai golongan dalam proses tersebut. (*)



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
(Foto YouTube)

Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI Fadel Muhammad:

Banyak Pihak Usulkan Perubahan Terhadap UUD

Wakil Ketua MPR RI dari kelompok DPD RI Fadel Muhammad, menyatakan bahwa sejak diamendemen pada era Reformasi, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nyaris berusia seperempat abad. Sejak itu, banyak kelemahan yang ditemukan muncul dari UUD NRI 1945 hasil empat tahap perubahan. Menujutnya, berbagai kalangan kini meminta agar UUD NRI 1945 segera disempurnakan, salah satunya untuk menguatkan lembaga MPR, DPR, dan DPD RI.

Saat mengantarkan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Penataan MPR, DPR, DPD RI di Masa Depan” di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (29/7/2024) yang menghadirkan narasumber tunggal Ketua Forum Aspirasi Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo selaku pembicara kunci, Fadel menjelaskan bahwa sejak UUD mengalami empat tahap perubahan, tugas dan kewenangan MPR berkurang secara signifikan, sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga

tertinggi negara. “MPR juga tidak bisa mengeluarkan ketetapan yang mengikat ke luar dan tidak memiliki kewenangan membuat garis besar haluan negara seperti sebelumnya,” kata Fadel dalam keterangannya pada Senin (29/7/2024).

Fadel menyoroti bahwa hilangnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) membuat arah pembangunan nasional menjadi tidak jelas, sehingga proses pembangunan tak memiliki arah yang pasti. Selain itu, UUD 1945 dinilai terlalu kecil memberikan tugas dan wewenang kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, membuat kehadiran DPD RI belum memberikan kontribusi

signifikan kepada proses pembangunan daerah.

Akibatnya, banyak daerah yang memandang sebelah mata atas kehadiran anggota DPD RI. “Itulah sebagian kecil kelemahan yang kami rasakan ada pada UUD NRI 1945 hasil empat tahap perubahan. Karena itu, akan lebih baik jika penataan ulang dan penguatan lembaga legislatif, baik MPR, DPR, maupun DPD, dilakukan melalui amendemen konstitusi,” tutur Fadel.

Fadel mengusulkan agar penataan ulang ini minimal bisa dimulai pada periode MPR yang akan datang, untuk memastikan lembaga legislatif dapat berfungsi

lebih efektif dan memberikan arah pembangunan yang jelas. (*)



Fadel Muhammad
(Foto AntaraNews.com)



Ketua FAK Jimly Asshiddiqie:

Amendemen Kelima UUD 1945 Sebuah Keniscayaan

Ketua Forum Aspirasi Konstitusi yang juga Anggota DPD RI asal Dawaerah Khusus Jakarta Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa mengacu pada waktu amendemen yang pernah dilakukan terhadap UUD NRI 1945, perubahan kelima kini merupakan suatu keniscayaan. Ia menekankan bahwa seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekurangan yang dirasakan pada UUD 1945, termasuk dalam pelaksanaan sistem demokrasi saat ini.

“Kita tidak boleh anti perubahan, karena amendemen adalah suatu keniscayaan. Apalagi usia konstitusi yang kita pakai sudah cukup untuk dilakukan penyempurnaan,” kata Jimly dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pena-taan MPR, DPR, DPD RI di

Masa Depan” di Ruang Dele-gasi, Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin

(29/7/2024). Ia menjelaskan bahwa penyempurnaan bu-kan berarti kembali ke UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan perbaikan dari UUD yang ada saat ini untuk disempurnakan ke depan.

Jimly menegaskan bahwa diskusi matang diperlukan untuk menentukan pasal-pasal yang perlu diperbaiki, termasuk penguatan lembaga DPD RI. Ia mengingatkan agar perubahan tidak dilaku-kan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan pertim-bangan yang matang.

Menurut Jimly, penting agar DPD RI tidak meng-ganggu atau mengambil alih kewenangan yang selama ini dimiliki DPR. Jika hal terse-but bisa dijaga, penguatan lembaga legislatif melalui amendemen konstitusi da-pat diwujudkan, minimal oleh MPR periode yang akan datang.

“Yang penting, DPD RI jangan sampai mengganggu apalagi mengambil alih kewenangan yang selama ini sudah dimiliki DPR. Kalau itu bisa dijaga, niscaya pe-nguatan lembaga legislatif melalui amendemen konsti-tusi bisa diwujudkan, mini-mal oleh MPR periode yang akan datang,” tutup Jimly. (*)



Ketua Forum Aspirasi Konstitusi yang juga Anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie (Foto Tempo.com)



Asta Cita Prabowo-Gibran Perlu Dijadikan PPHN 2024-2029

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Prabowo Subianto dalam suatu kesempatan acara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mengusulkan agar visi misi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang disebut Asta Cita, dijadikan sebagai materi dalam merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) 2024-2029. Menurut Sultan, keberadaan PPHN sangat penting karena negara ini memerlukan visi yang bukan pribadi atau kelompok, melainkan visi bangsa Indonesia untuk menentukan arah pembangunan nasional.

“Sehingga MPR RI perlu menetapkan visi presiden terpilih menjadi PPHN yang

akan dijadikan pedoman pembangunan nasional selama satu periode, agar tidak terjadi bias kebijakan yang mengganggu kinerja pemerintahan ke depan,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, Rabu (17/7/2024).

Sultan menjelaskan bahwa penyesuaian rumusan PPHN dengan Asta Cita Prabowo-Gibran bukan hanya relevan dan mendesak dalam agenda pembangunan nasional, tetapi juga mempertahankan kesinambungan dengan visi Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir. Ia menilai delapan program Asta Cita sangat inklusif, komprehensif, dan visioner, serta optimis bahwa

Asta Cita mampu menjawab tantangan global dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Sultan, kesesuaian PPHN dengan visi atau janji kampanye presiden terpilih akan meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pengawasan oleh DPR RI dan DPD RI. Hal ini karena perencanaan yang matang dan efisien antara pemerintah dan DPR RI.

“Pasca pemilu, Asta Cita bukan lagi menjadi visi seorang presiden Prabowo yang identik dengan angka delapan, namun sudah menjadi misi kebangsaan yang mesti ditetapkan sebagai agenda pembangunan nasional melalui PPHN,” tutupnya. (*)

Daerah Penyangga IKN Kaltim Harus Dibuat Keren

Berepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin, menggelar acara “Ruang Dialog Kaltim Keren” di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (1/6/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa milenial, serta beberapa peserta dari generasi yang lebih senior.

Acara ini dirancang sebagai forum dialog terbuka untuk mendengar aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. “Saya senang bergaul dengan anak-anak muda karena banyak masukan segar yang saya dapatkan. Selain itu, berkumpul dengan anak muda membuat saya merasa awet muda,” kata Mahyudin.

Pada kesempatan itu, Mahyudin menekankan pentingnya Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang harus siap menghadapi tantangan. “Kaltim harus dibuat keren agar tidak jomplang dengan IKN yang keren. Program-program yang kami tawarkan adalah bagian dari jawaban atas tantangan di masa depan,” ujarnya. Program yang



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama mahasiswa milenial usai acara “Ruang Dialog Kaltim Keren”. (Foto Berita Kaltim)

direncanakan mencakup peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan ketergantungan dari sektor tambang, pengembangan industri, dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kami akan belajar dari China dalam mengelola UMKM yang sangat baik di sana,” tambahnya.

Sementara itu, Oki (21), mahasiswa asal Kabupaten Berau yang melanjutkan pendidikan di Universitas Widyagama, menyatakan bahwa Mahyudin memiliki komitmen untuk anak-anak muda menuju Indonesia Emas tahun 2045 dalam mengembangkan sumber daya manusianya. “Peme-

rintah harus membantu anak-anak muda, khususnya di UMKM,” tuturnya. Oki mengingat Mahyudin pernah menyatakan dalam satu kegiatan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) bahwa pemerintah harus menyiapkan modal untuk anak muda karena merekalah yang akan mewarisi Indonesia berikutnya.

Oki berharap Mahyudin dapat menyerap aspirasi dan kegelisahan mahasiswa, terutama dalam persoalan ekonomi. “Paling berat bagi mahasiswa yang merantau adalah ekonomi. Saya dan teman-teman bersepakat untuk memulai usaha karena latar belakang kami adalah petani,” kata Oki. (*)

Senator Syech Fadhil Dukung Mengaji Limit Sebelum Belajar

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, HM Fadhil Rahmi, mengapresiasi dan mendukung kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) dan Pj Gubernur Aceh yang kembali menggalakkan rutinitas mengaji selama lima belas menit sebelum memulai pelajaran setiap hari bagi siswa di Aceh.

Kebijakan ini dianggap penting untuk membumikan Al-Qur'an di Aceh serta menumbuhkan generasi Qur'ani di masa depan. "Kita meng-

apresiasi kebijakan ini dan saya nilai sangat penting. Ini bagian dari pemberantasan buta huruf Al-Qur'an di kalangan generasi muda Aceh saat ini," kata Syech Fadhil di Jakarta belum lama ini.

Menurut Fadhil, riset sebelumnya menunjukkan banyak mahasiswa di Aceh yang kurang lancar membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, kegiatan mengaji 15 menit setiap hari sebelum pelajaran di sekolah-sekolah di Aceh diharapkan menjadi solusi bagi pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di kalangan generasi muda Aceh. Selain itu, kebijakan mengaji sebelum pelajaran dimulai juga penting dalam menciptakan generasi Islami. "Yang penting bukan sekedar membaca Al-Qur'an, tapi juga memben-

tuk karakter siswa yang Islami serta sesuai dengan nilai-nilai Islami," tambahnya.

Program ini diluncurkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari M.Si, bersama Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, H. Bustami Hamzah, pada Selasa, 23 Juli 2024. Program Lima Belas Menit (Limit) Bersama Qur'an merupakan bagian dari Gerakan Tuntas Baca (Getba) Qur'an, yang diluncurkan di SMA Negeri 11 Banda Aceh.

Peluncuran ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis. Pj Gubernur Aceh dan Kakanwil Kemenag mengharapkan dukungan dan kolaborasi bersama, baik di internal maupun eksternal sekolah, untuk jenjang SMA dan SMK. Gerakan Tuntas Baca Qur'an ini merupakan program yang bertujuan menuntaskan baca tulis Al-Qur'an di sekolah umum dan diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di Aceh. (*)

Anggota DPD RI HM Fadhil Rahmi
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Guru Swasta di Lampung Utara Curhat ke Senator Abdul Hakim



Anggota DPD RI Abdul Hakim menerima aspirasi guru sekolah swasta di Lampung Utara. (Foto Warta Lampung).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Hakim melakukan pertemuan dengan sejumlah guru sekolah swasta di Lampung Utara, Lampung, pada Selasa (30/7/2024). Pertemuan yang berlangsung di salah satu sekolah swasta di Kotabumi ini menjadi wadah bagi Abdul Hakim untuk mendengarkan langsung keluhan para guru terkait berbagai masalah yang mereka hadapi, terutama mengenai kesejahteraan.

Para guru menyampaikan aspirasi dan keluhan, mulai dari rendahnya gaji, kurangnya tunjangan, hingga minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah swasta. Mereka ber-

harap adanya kebijakan yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan mereka sebagai pendidik. "Saya memahami dan merasakan apa yang bapak dan ibu guru rasakan. Peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas," ungkap Abdul Hakim.

Abdul Hakim berjanji akan memperjuangkan aspirasi para guru ini ke tingkat yang lebih tinggi dan mengupayakan solusi yang konkret. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada sektor pendidikan, khususnya untuk sekolah-

sekolah swasta.

Pertemuan tersebut diisi dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana para guru bisa menyampaikan berbagai masalah dan saran secara langsung. Acara ini diakhiri dengan doa bersama, berharap agar perjuangan untuk kesejahteraan guru dapat segera terwujud.

Kegiatan reses ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama antara pemerintah dan tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung Utara. Para guru mengapresiasi kunjungan Abdul Hakim dan berharap ada langkah nyata yang diambil untuk memperbaiki kondisi mereka. (*)

LaNyalla Minta Pemda Dukung Program Sertifikat Halal

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud

Mattalitti mengingatkan pelaku usaha harus mengikuti program sertifikasi halal. Sebab, dalam memilih makanan, masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam mengedepankan aspek kehalalan dalam memilih sebuah produk makanan.

“Kesadaran akan sertifikasi halal ini penting untuk terus disosialisasikan. Saya kira memang sudah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberitahukan produknya halal atau tidak yang ditandai dengan sertifikasi halal,” kata LaNyalla ketika menerima aspirasi Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nadlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim, Rabu (17/7/2024).

Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan pemerintah daerah (pemda), wajib memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi halal tersebut, karena produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah.

Sebelumnya, Ketua PW Lembaga Solusi Halal ISNU Jawa Timur Siti Nur Husnul



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nadlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Timur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Yusmiati melaporkan masih banyak pelaku usaha di Jawa Timur yang belum tersertifikasi halal. Dalam rangka mengencarkan pentingnya sertifikasi halal, mereka meminta dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Sebagai lembaga solusi halal, PW ISNU Jawa Timur memiliki 33 trainer Proses Produk Halal (PPH) profesional yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota se-Jawa Timur. Lembaganya juga sukses melaksanakan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Husnul merekomendasikan empat hal agar dapat ditin-

dakanjuti oleh Ketua DPD RI. *Pertama*, masih perlu sosialisasi pentingnya sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ke masyarakat, terutama pelaku usaha.

Kedua, perlu dukungan pemerintah daerah yang lebih optimal, tidak ada blokade-blokade khusus untuk pendamping tertentu. *Ketiga*, perlu dukungan pendanaan untuk program aktivasi pendamping lebih masif. Terakhir, pengawasan terhadap penyalahgunaan sertifikasi halal dan prosesnya, serta kedisiplinan para pengguna sertifikasi halal perlu segera diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (*)



5 Aktivis NU Temui Presiden Israel Pemerintah Diminta Bersikap Tegas

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta Dailami Firdaus, mengecam kunjungan lima Nahdliyin atau aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog beberapa hari lalu. Dailami menegaskan bahwa sikap Pemerintah Indonesia sudah tegas menentang Israel dan mendukung Palestina. “Pemerintah Indonesia sudah secara tegas mengutuk tindakan tersebut, menentang Israel dan mendukung rakyat Palestina. Kelima oknum yang dikenal sebagai aktivis Nahdlatul Ulama (NU) ini jelas melukai perasaan kita semua, saya sangat miris,” ujar Dailami dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Dailami meminta pemerintah Indonesia maupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil tindakan tegas. Dia bahkan meminta kelimanya diberi sanksi karena secara kasat mata lima aktivis NU tersebut sudah jelas tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam hubungan diplomatik internasional. Dailami mengatakan sanksi tegas harus diberikan untuk mencegah hal serupa terulang. Sebab, katanya, mestinya lima Nahdliyin sebagai umat Islam memiliki keberpihakan kepada sesama muslim. “Saat ini sudah menggema gerakan *All Eyes on Rafah* sebagai bentuk perlawanan kepada kejahatan dan kekejaman Israel. Apa sebab mereka sebagai sesama muslim sampai tidak punya empati?” tegasnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI ini mengajak agar umat Islam di Indonesia terus bahu membahu membantu dan jangan menyakiti rakyat Palestina.

Dia meminta semua warga Indonesia jangan lupa sejarah bahwa Palestina adalah yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia saat masa penjajahan. Pada 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Amin Al-Husaini, menyampaikannya kepada dunia terkait dukungan terbuka atas kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil lima orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam pemanggilan tersebut, PBNU akan mengklarifikasi latar belakang pemberangkatan lima tokoh muda itu. “Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya,” kata Gus Ipul, dilansir Antara, Senin (15/7/2024).

PBNU juga segera memanggil pimpinan badan otonom (banom), serta lembaga tempat kelima orang tersebut mengabdikan diri. Ia menjelaskan bahwa jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom. (*)



Anggota DPD RI Dailami Firdaus.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Perlu Dievaluasi, Sidang Bersama DPR-DPD RI



Ilustrasi sidang bersama DPR-DPD RI (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie menilai bahwa Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang biasanya diselenggarakan pada 16 Agustus, seharusnya menjadi ajang bagi MPR RI untuk menyerap aspirasi rakyat dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden.

“Sidang tahunan itu penting untuk laporan kepada rakyat melalui forum MPR RI. Saya juga melihat sidang tahunan yang sekarang ini jadi bergiliran. Saya kalau nonton ini, kenapa jadi begini, itu pemerintah juga repot,” ucap Jimly dalam diskusi bertajuk ‘Penataan MPR,

DPR, DPD RI di Masa Depan’ di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Menurut Jimly, makna dari sidang tahunan adalah untuk menyampaikan laporan kepada rakyat, serta memberikan pidato kenegaraan. Seperti halnya Presiden Amerika Serikat yang berpidato setiap Juli, sidang tahunan di Indonesia juga harus memiliki makna serupa, bukan hanya sebagai pidato teknis RAPBN.

Dia mengusulkan agar pimpinan MPR RI memperbaiki teknis sidang tahunan dan mengubah jadwal kenegaraan, agar 16 Agustus lebih fokus pada pidato Presiden. Sementara itu, upacara bendera yang dilaksanakan pada 17 Agustus

tidak perlu dicampurkan dengan pidato kenegaraan. “Jadi yang inti dari 16 Agustus itu pidato presiden. Kalau yang 17 itu tidak pakai pidato, itu hanya upacara bendera,” tandasnya.

Jimly juga berpendapat bahwa sidang RAPBN yang dilakukan pada hari yang sama perlu dievaluasi. RAPBN berkaitan dengan DPR RI dan tidak relevan dengan MPR RI. Dia mengusulkan agar jadwal tahun anggaran yang mulai pada Januari tidak dipaksakan dengan sidang pada 16 Agustus. “Harusnya bukan 16 Agustus. Kebutuhan untuk persiapan APBN tahun berikutnya harus dihitung. Saya enggak tahu sebaiknya bulan apa, tapi jangan Agustus. Agustus itu lebih baik fokus untuk peringatan 17-an,” tegasnya. (*)

Implementasi UU Pemasyarakatan Belum Mampu Atasi Masalah di Lapas

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai penyelenggaraan proses pemasyarakatan di daerah banyak menghadapi persoalan yang berpotensi menjadi pemicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Persoalan tersebut, seperti ketidakseragaman dalam pelaksanaan tata laksana peradilan pidana, kelengkapan pemberkasan yang belum berjalan baik di lapas/rutan, serta pelayanan diversi yang belum optimal.

“Implementasi UU Pemasyarakatan di daerah perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut,” kata Wakil Ketua Komite I Sylviana Murni saat membuka rapat dengar pendapat Komite I DPD RI bersama Guru Besar Kriminologi FISIP UI Adrianus Meliala dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, membahas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Juli lalu.

Sedangkan Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma memandang permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sebenarnya bukan hanya terkait implementasi UU. Ia melihat masalah moral dan etika para penyelenggara kebijakan harus ditegaskan, karena itu modal



Pimpinan Komite I DPD RI saat rapat dengar pendapat bersama Kriminologi FISIP UI Adrianus Meliala dan Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dan prioritas utama dalam implementasi penegakan hukum. “Lembaga pemasyarakatan diciptakan untuk membina warga yang bermasalah ini jangan sampai malah jadi merusak,” tegas Filep.

Ketua Komite I Fachrul Razi melihat kondisi beberapa lapas ketika melakukan kunjungan kerja terkait UU Pemasyarakatan di daerah menemukan bahwa semua permasalahan yang dibahas pada rapat tersebut nyata terjadi di lapangan. Ekspektasi dari lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2022 ini sangat tinggi, namun kondisi sistem yang berjalan di lapangan masih belum ada perubahan.

“Implementasi pelaksanaan dari UU Pemasyarakatan ini pada kenyataannya belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada. Komite

I DPD RI akan mendorong agar dua rancangan peraturan pemerintah (RPP) itu dipercepat segera menjadi peraturan pemerintah (PP) yang nantinya mampu meminimalisir persoalan yang ada terkait pemasyarakatan,” kata Fachrul Razi.

Sedangkan Kriminolog FISIP UI Adrianus Meliala menyatakan UU Pemasyarakatan sejatinya mampu mengatur tentang fungsi dan sistem pemasyarakatan yang paripurna. Namun struktur dan ortala bagi pelaksanaannya tidak berubah, tetap seperti UU Nomor 12 Tahun 1995. Ia juga melihat, meski banyak hal baru termaktub dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, namun banyak pula hal baru yang belum masuk dan menunggu giliran pada saat revisi UU tersebut. (*)

Pengawasan Obat dan Makanan Perlu Secara Komprehensif

Kasus penyalahgunaan obat dan makanan masih marak terjadi, yang menimbulkan dampak kesehatan yang serius hingga mengancam jiwa. Karena itu, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat. Karena pengetahuan masyarakat masih minim dalam memilih obat dan makanan.

“Negara memiliki kewajiban melakukan pengawasan atas produksi dan peredaran obat dan makanan, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Globalisasi menuntut kesamaan standarisasi atas mutu atau kualitas produk obat dan makanan yang beredar, maka perlu adanya pengawasan pada tahap *pre-market* hingga *post-market*,” kata Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rizka Andalusia, Juli lalu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan substansi pengawasan obat dan makanan telah diatur dalam berbagai regulasi yang telah terlebih dahulu diterbitkan. Itulah alasannya



Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, Menkes Budi Gunadi dan Plt. Kepala BPOM Rizka Andalusia memperlihatkan kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pemerintah menolak kelanjutan pembahasan RUU POM. “Nanti akan kami sampaikan ke Komisi III, daftar inventaris masalah yang intinya mengatur pembentukan dan kewenangan lembaga terkait pengawasan obat dan makanan sudah diatur dalam beberapa UU seperti UU Pangan, UU Kesehatan, dan UU Cipta Kerja. Sehingga tidak perlu diatur secara tersendiri. Kami nanti akan minta agar dihentikan pembahasannya,” ujarnya.

Meski demikian, Budi Gunadi mengakui bahwa dalam implementasinya pengawasan obat dan makanan bukannya tidak memiliki persoalan, namun pemerintah memandang yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pelaksanaan di lapangan, dan tidak perlu sampai harus

menghadirkan lembaga atau badan baru.

Plt. Kepala BPOM Rizka Andalusia mengatakan kewenangan yang diberikan kepada BPOM sudah cukup, hanya saja perlu dilakukan penguatan dari aspek organisasi, seperti menambahkan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) sampai ke tingkat kabupaten/kota serta daerah terpencil.

“Harapannya di setiap kabupaten/kota ada UPT-nya, tapi untuk membentuk UPT itu tidak mudah, diperlukan pertimbangan yang sangat rigid dan tentunya dibutuhkan penambahan SDM dan anggaran. Itulah yang kami maksud penguatan kelembagaan. Kalau untuk kewenangan sudah cukup kuat,” jelasnya. (*)

Ketua Komite I DPD RI Kunjungi Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi selaku Ketua Pansus Revisi UU TNI No. 24 Tahun 2004 serta Revisi UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, melakukan kunjungan ke Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda serta Polda Aceh, Kamis (25/07/25). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari kedua institusi negara tersebut.

Di Kodam Iskandar Muda, senator dari Aceh itu diterima Kepala Staf Kodam Brigjen TNI Ayi Supriatna. Sedangkan di Polda Aceh, dia diterima langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko. “Suatu kebanggaan bagi kami bisa berdiskusi mengenai peran, tugas, dan fungsi Kodam Iskandar Muda. Kami juga mendapatkan masukan positif khususnya untuk masa depan Kodam IM,” ujar Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Ayi Supriatna.

Pada kesempatan tersebut, Fachrul Razi menjelaskan tugas dan fungsi Komite I DPD RI, termasuk penunjukannya sebagai Ketua Pansus Revisi UU TNI. “Kami ingin menerima masukan yang berkaitan dengan tugas Kodam Iskandar Muda terkait masa kerja prajurit TNI yang relatif lebih singkat dibandingkan Polri,” jelas Razi.

Sementara itu, di Polda Aceh, Fachrul Razi juga menjelaskan maksud dan tujuan kehadirannya. “Dalam waktu



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Ayi Supriatna. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dekat akan dilaksanakan revisi UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Sebagai Ketua Pansus, kami berkunjung dalam rangka menerima masukan guna memperkuat revisi UU Kepolisian,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi menjelaskan bahwa pihaknya juga ingin menerima masukan yang berkaitan dengan masa tugas anggota Polri yang secara umum dapat dikatakan relatif lebih singkat dibandingkan dengan institusi pemerintah lainnya. Kemudian, Razi juga membicarakan terkait dengan wewenang penegakan hukum dalam bentuk tindak

pidana umum, khususnya permasalahan Jinayah di Aceh.

Terkait hal lain, Fachrul Razi juga menanyakan kesiapan Polda Aceh dalam mengamankan wilayah pantai yang ada di Aceh. Mengingat Aceh merupakan wilayah yang memiliki panjang garis pantai yang cukup luas dibandingkan provinsi-provinsi lain di Sumatera, sehingga memerlukan armada yang cukup untuk melakukan patroli dalam rangka menjaga keamanan nasional. Mengingat Aceh merupakan pintu masuk yang mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. (*)

HUT Ke-5 DWP Setjen DPD RI Peduli dan Berbagi Kebahagiaan

Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-5, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan kegiatan santunan anak yatim dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Perayaan HUT DWP Setjen DPD RI ini dihadiri Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputy Bidang Persidangan Oni Chairuddin, dan segenap pejabat Setjen DPD RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/7/2024).

Kegiatan HUT DWP dengan tema “Peduli dan Berbagi untuk Kebahagiaan Bersama” itu menghadirkan anak-anak yatim dari pegawai di lingkungan Setjen DPD RI dan bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Ketua DWP Setjen DPD RI, Zuliana Rahman Hadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan kepedulian kepada sesama, sekaligus menjadi pengingat dalam menjaga keselamatan di jalan.

“Kami berharap kegiatan peduli dan berbagi seperti ini terus berjalan dan membantu setiap elemen di Sekretariat Jenderal DPD RI, sehingga memberikan manfaat yang luar biasa khususnya bagi segenap pegawai dan keluarga besar Setjen DPD RI,” ujar



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Ketua DWP Setjen DPD RI Zuliana Rahman Hadi menyerahkan bingkisan kepada salah seorang anak yatim. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Ketua DWP Setjen DPD RI Zuliana Rahman Hadi bersama sejumlah pejabat di Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Zuliana.

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan santunan anak yatim dan memfasilitasi pembuatan SIM yang digalang oleh DWP Setjen DPD RI. “Saya mengucapkan

terima kasih kepada DWP Setjen DPD RI atas terselenggaranya kegiatan yang positif dan memberikan banyak manfaat ini. Ke depan, tentunya menjadi komitmen Setjen DPD RI,” ujar Rahman Hadi. (*)



Kantor DPD RI Aceh Kerja Sama dengan Museum Tsunami Aceh

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Aceh, Wahyu Taufik Sukmawijaya saat mengunjungi Museum Tsunami Aceh. (Foto Humas DPD RI Aceh)

Kepala Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Aceh Wahyu Taufik Sukmawijaya, melaksanakan kunjungan ke Museum Tsunami Aceh pada Senin (8/7/2024). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama antara DPD RI dengan UPTD Museum Tsunami Aceh serta memperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat tentang keberadaan museum yang berisi bukti-bukti sejarah tsunami Aceh.

Kunjungan ini dimulai dengan sambutan hangat dari pemandu wisata museum, Syahrizal, yang mengiringi Wahyu Taufik Sukmawijaya berkeliling dan menjelaskan

secara detail setiap sudut dan spot penting di dalam museum.

Wahyu terkesan dengan arsitektur dan keunikan koleksi museum, khususnya kisah heroik tentang peran gajah dalam evakuasi korban tsunami. “Saya sangat tertarik dengan arsitektur dan *spot* bukti-bukti tsunami yang fantastis dan berkesan,” ujar Wahyu.

Ia juga tak lupa memberikan doa terbaik bagi para korban tsunami yang telah berpulang. Di akhir kunjungannya, Wahyu membahas rencana kerja sama lebih lanjut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terkait publikasi videotron di Mu-

seum Tsunami.

Rencana ini mencakup penayangan slide video infografis tentang lembaga DPD RI, pimpinan, dan anggota DPD RI asal Aceh, yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi publik tentang peran DPD RI.

Wahyu Taufik Sukmawijaya menyampaikan apresiasi kepada UPTD Museum Tsunami Aceh atas kerja samanya dalam mengelola museum ini sebagai bagian dari upaya mempromosikan sejarah dan budaya Aceh. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar lembaga dan meningkatkan upaya bersama dalam melestarikan sejarah bencana dan kehidupan masyarakat Aceh. (*)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin, memimpin Sidang Paripurna Masa Sidang V Tahun 2023-2024 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Pimpinan dan anggota DPD RI berfoto bersama usai Sidang Paripurna Masa Sidang V Tahun 2023-2024 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama Ketua DWP Setjen DPD RI dan pejabat di lingkungan Setjen DPD RI usai memberi santunan kepada anak yatim dalam rangkaian kegiatan HUT ke-5 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





Penguatan Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Alasan dan Dasar Hukumnya

Oleh:
M.S.RUNDUPADANG, SH, MH.
(Analisis Legislatif Madya)

Pendahuluan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Penguatan lembaga ini menjadi penting untuk menjawab tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan jumlah produk yang harus diawasi. Tulisan ini akan membahas alasan penguatan BPOM serta dasar hukumnya.

Alasan Penguatan BPOM

1. Peningkatan Produk yang Diawasi

Perkembangan teknologi dan globalisasi menyebabkan peningkatan jumlah dan variasi produk obat dan makanan yang masuk ke pasar. BPOM harus mampu menjawab tantangan ini dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan dan pengujian produk.

2. Kompleksitas Regulasi dan Pengawasan

Peraturan terkait obat dan makanan semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. BPOM perlu memperkuat kemampuan analisis regulasinya agar dapat mengimbangi perkembangan ini, serta memastikan bahwa regulasi yang ada selalu relevan dan efektif.

3. Meningkatnya Kesadaran dan Ekspektasi Publik

Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan obat dan makanan semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan BPOM mampu memberikan jaminan keamanan yang maksimal. Penguatan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengawasan.

4. Ancaman Terhadap Keamanan Kesehatan

Peredaran obat palsu, makanan berbahaya, dan produk kosmetik yang tidak sesuai standar menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. BPOM harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak pelanggaran ini.

Dasar Hukum Penguatan BPOM





1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. BPOM sebagai lembaga pengawas dituntut untuk menjalankan fungsi ini dengan optimal.

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Presiden ini memberikan landasan hukum bagi BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu poin penting adalah kewenangan BPOM untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Penguatan BPOM diperlukan agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

3. Peraturan Menteri Kesehatan

Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan seringkali menjadi acuan bagi BPOM dalam menjalankan pengawasan. Misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara

Pembuatan Makanan yang Baik (CPMB) menjadi standar yang harus dipatuhi oleh industri. BPOM perlu diperkuat untuk memastikan bahwa standar ini benar-benar diterapkan di lapangan.

Langkah-Langkah Penguatan BPOM

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang kompeten dan berintegritas adalah kunci utama keberhasilan pengawasan. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai BPOM harus menjadi prioritas. Selain itu, rekrutmen tenaga ahli di bidang farmasi, kimia, biologi, dan teknologi pangan perlu ditingkatkan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Laboratorium pengujian dengan teknologi canggih dan fasilitas penunjang lainnya sangat dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana ini akan mempercepat dan memperakurat proses pengujian produk.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

BPOM perlu memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam penegakan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran harus diperberat untuk mem-

berikan efek jera. Selain itu, perlu ada harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan internasional agar pengawasan lebih efektif.

4. Kerjasama dengan Lembaga Lain

Kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam negeri maupun internasional, perlu ditingkatkan. Hal ini termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga internasional seperti WHO dan FDA. Kerjasama ini akan memperkuat kapasitas BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Kesimpulan

Penguatan BPOM adalah kebutuhan yang mendesak mengingat tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Alasan-alasan seperti peningkatan jumlah produk yang diawasi, kompleksitas regulasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat menuntut BPOM untuk lebih kuat dan responsif. Dasar hukum yang ada memberikan landasan yang kuat bagi penguatan ini, dan langkah-langkah konkret seperti peningkatan SDM, sarana prasarana, regulasi, dan kerjasama lintas lembaga harus segera diimplementasikan. Dengan penguatan BPOM, diharapkan keamanan dan kesehatan masyarakat dapat lebih terjamin. (*)

Empat Destinasi Paling Disenangi di Bandar Lampung

Four Most Popular Destinations in Bandar Lampung

1 Pantai Pasir Putih (White Sand Beach)

Pantai Pasir Putih (*White Sand Beach*): Sebuah pantai yang terkenal dengan pasirnya yang putih dan air laut yang jernih. Pantai ini sangat cocok untuk bersantai, berenang, atau snorkeling. Selain itu, pengunjung bisa menyewa perahu untuk mengunjungi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang menawarkan pemandangan indah dan suasana yang tenang.



Aktivitas menyelam di Pantai Pasir Putih Bandar Lampung. (Foto Rumah123.com)

This beach is famous for its white sand and clear sea water. It is perfect for relaxing, swimming, or snorkeling. Additionally, visitors can rent boats to visit small nearby islands that offer beautiful views and a tranquil atmosphere.

2 Puncak Mas

Puncak Mas: Adalah destinasi lainnya yang menawarkan pemandangan kota Bandar Lampung dari ketinggian. Terletak di dataran tinggi, tempat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi seperti rumah pohon, kafe, dan area bermain anak. Puncak Mas juga terkenal sebagai spot foto yang *instagramable*, terutama saat matahari terbenam. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana sejuk dan pemandangan kota yang memukau dari atas bukit.



Pemandangan malam dari Puncak Mas Lampung ke Kota Bandar Lampung. (Foto Rumah123.com)

Another destination offering panoramic views of Bandar Lampung from a high elevation. Located in the highlands, this place is equipped with various recreational facilities such as tree houses, cafes, and children's play areas. Puncak Mas is also known for its Instagram-worthy photo spots, especially at sunset. Here, visitors can enjoy the cool breeze and stunning city views from the hilltop

3

Kebun Raya Lembah Hijau (*Lembah Hijau Botanical Garden*)

Kebun Raya Lembah Hijau (Lembah Hijau Botanical Garden): Adalah tempat yang sempurna untuk menikmati keindahan alam dan belajar tentang flora dan fauna lokal. Kebun raya ini memiliki koleksi tanaman yang beragam, area piknik, dan berbagai wahana permainan untuk anak-anak. Selain itu, terdapat juga taman satwa yang menampilkan berbagai jenis hewan, menjadikan tempat ini destinasi edukatif sekaligus rekreatif untuk keluarga.



Pemandian Lembah Hijau yang mengasyikkan. (Foto TravelsPromo.com)

This is the perfect place to enjoy natural beauty and learn about local flora and fauna. The botanical garden has a diverse collection of plants, picnic areas, and various playgrounds for children. Additionally, there is a zoo showcasing various animals, making this an educational as well as recreational destination for families.

4

Pulau Pahawang (*Pahawang Island*)

Pulau Pahawang (Pahawang Island): Adalah surga bagi para penyelam dan pecinta snorkeling. Terletak di Teluk Lampung, pulau ini terkenal dengan keindahan terumbu karangnya dan beragam biota laut. Pengunjung bisa menikmati kegiatan snorkeling atau diving untuk melihat keindahan bawah laut yang menakjubkan. Pulau ini juga menawarkan pantai yang bersih dan suasana yang tenang, cocok untuk beristirahat dan menikmati alam. Dengan berbagai pilihan aktivitas air dan pemandangan alam yang indah, Pulau Pahawang menjadi destinasi favorit di sekitar Bandar Lampung.



Pulau Pahawang, Lampung. (Foto Bumi Wisata Indonesia)

A paradise for divers and snorkeling enthusiasts. Located in Teluk Lampung, this island is famous for its beautiful coral reefs and diverse marine life. Visitors can enjoy snorkeling or diving to witness the stunning underwater beauty. The island also offers clean beaches and a peaceful atmosphere, perfect for resting and enjoying nature. With a variety of water activities and beautiful scenery, Pulau Pahawang is a favorite destination around Bandar Lampung.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan Selamat

Hari Veteran Nasional

Tanpa perjuangan dan pengorbanan para veteran, kita tidak akan merasakan kebebasan yang kita nikmati saat ini.

10 Agustus 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

